

## **Pengelolaan Harta Masyarakat Kelas Menengah Muslim Kota Medan Dengan Pendekatan *Islamic Wealth Management***

**Sugianto**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
sugianto@uinsu.ac.id

### ***Abstract***

Management of wealth in the Islamic economy becomes important especially because the main economic problem in the Islamic economy is the unequal distribution of resources (assets). This research aims to describe the creation and development, preservation and protection, expenditure and distribution of assets of the new Muslim middle class in Medan. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data was collected through interviews and document studies. Data analysis uses descriptive qualitative analysis. The results showed that business planning and investment planning were mostly carried out by the Medan Muslim middle class. It's just that the use of LKS is still low. While planning for the protection of assets through Islamic financial institutions is still low, so is financial planning through Islamic financial institutions is still low; family financial planning is also quite good but the use of Islamic financial institutions is still low; and religious financial planning has not been an effort as well as in the use of Islamic financial institutions which are still low.

**Keywords:** IWM, wealth management, Muslim middle class

### **Pendahuluan**

Pengelolaan harta telah menjadi hal yang niscaya seiring perkembangan peradaban manusia dan keinginan mempertahankan kemampuan finansial terutama prestise sosial. Pengelolaan harta dalam ekonomi Islam mendapatkan porsi yang sangat signifikan. Bahkan permasalahan utama ekonomi dalam ekonomi Islam adalah ketidak-merataan distribusi sumber daya (harta) yang selanjutnya berakibat terjadinya fenomena kelangkaan.

Uraian di atas menunjukkan bahwa keterkaitan seorang Muslim dengan harta meliputi seluruh aspek kehidupan dalam siklus kehidupannya hingga untuk kepentingan di Akhirah. Jika siklus kehidupan dihadapkan dengan harta, maka sejak manusia dilahirkan maka akan dimulai dengan kebutuhan sehari-hari, ibadah *aqiqah*, *khitan*, pendidikan, persiapan pernikahan, persiapan kelahiran anak, pembelian rumah, pembelian kendaraan bermotor, ibadah zakat, *qurban*, haji dan umrah, kebutuhan investasi dalam rangka pengembangan harta, asuransi, *infaq*

dan *shadaqah*, *hibah* dan wakaf, nafkah orang tua, persiapan pensiun, kemudian warisan.

Berbagai pengelolaan harta dalam siklus kehidupan tersebut membutuhkan *wealth management* yang baik dan tentunya sangat dibutuhkan lembaga keuangan syariah. Kenyataannya, masih terdapat masyarakat muslim dalam mengelola harta untuk memenuhi kebutuhan siklus hidup tersebut tidak terencanakan dengan baik. Hal ini juga didukung masih rendahnya dalam memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebagai sarana dalam pengelolaan harta tersebut. Rangkaian proses atau aktivitas ini disebut literasi keuangan. Menurut OJK, “literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan” (POJK, 2016)

Berdasarkan hasil survei OJK tahun 2016 bahwa tingkat literasi keuangan nasional adalah sebesar 29,66% (OJK, 2016). Sedangkan pada tahun 2016 data kelas menengah dengan belanja Rp.100.000 – Rp.200.000,- per hari mencapai 129 juta orang (Detik Finance, 2016). Kota-kota kelas menengah dengan penghuni lebih dari dua juta orang berdasarkan hasil penelitian McKinsey Global Institute (2012), pertumbuhan kelas menengahnya mencapai rata-rata tahunan sebesar 6,4% sejak 2002 justru di Kota Medan, Bandung dan Surabaya serta sebagian wilayah seputar Jakarta, seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi. Sedangkan Jakarta sendiri pertumbuhan kelas menengahnya rata-rata hanya sebesar 5,8%.

Berdasarkan laporan penelitian di atas menunjukkan bahwa Kota Medan termasuk salah satu kota yang mengalami pertumbuhan kelas menengah yang signifikan. Namun kajian tentang pengelolaan harta kelompok masyarakat ini belum banyak dilakukan. Namun, jika ditelaah lebih lanjut uraian di atas menunjukkan adanya ironi antara pertumbuhan kelas menengah perkotaan, khususnya Kota Medan, yang pesat tetapi tidak diikuti dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi sebagai representasi dari pengelolaan harta kelas menengah. Berdasarkan hal tersebut penelitian tentang pengelolaan harta pada masyarakat kelas menengah Muslim Kota Medan menarik untuk dilakukan.

### **Kerangka Teoritis**

Dalam Islam, setiap usaha manusia dalam mengelola harta dipandu oleh keyakinan tertentu. Keyakinan ini digambarkan sebagai dasar filosofis dalam

masyarakat Islam. Menurut Kurshid Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Ma'sum Billah, dasar filosofis tersebut adalah (1) Tauhid (keyakinan akan keesaan Allah); (2) Rubbubiyah (pedoman ilahi untuk berjuang menuju semua yang baik); (3) Khalifah (peran manusia sebagai khalifah Allah); (4) Tazkiyah (mencapai kemurnian dan pertumbuhan); dan (5) Akuntabilitas (keyakinan bahwa manusia akan jawab atas tindakannya di dunia ini pada Hari Penghakiman) (Ma'sum Billah, 2012; Farooq, 2014).

Wealth management dalam Islam dapat dilihat dari perspektif yang berbeda. Ini termasuk pengelolaan zakat, warisan, wasiat dan wasiat, perencanaan perumahan, pengelolaan kas dan tabungan, pengelolaan pajak dan kewajiban negara, dan transaksi bisnis yang berbeda. Ma'sum Billah menyatakan bahwa *wealth management* dalam perspektif Islam harus dilandasi oleh *world view* Islam dan ketentuan syariah (Ma'sum Billah, 2012).

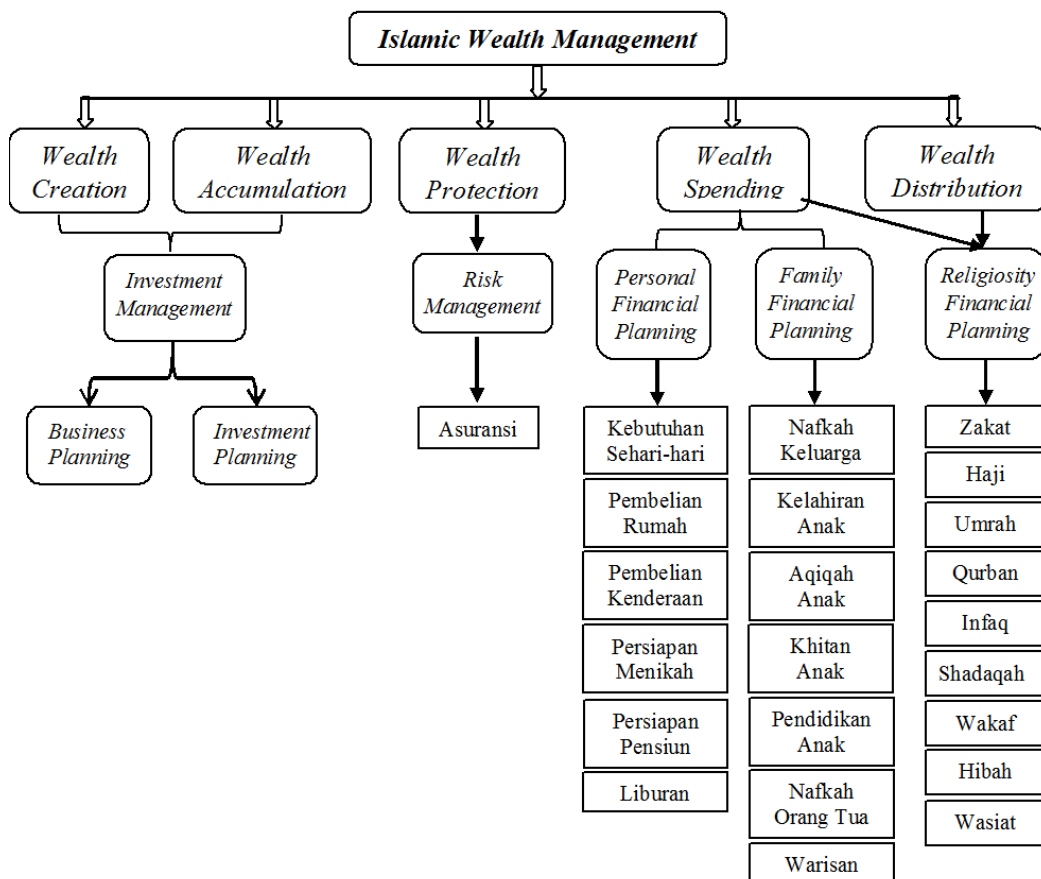
Aspek-aspek *Islami wealth management* dapat diuraikan sebagai berikut (Sugianto, 2018). Pertama, *investment management*, yaitu mengelola harta atau dana melalui investasi. Pada bagian ini merupakan pengelolaan harta yang diderivasi dari *wealth creation* dan *wealth accumulation*. *Investment management* terdiri dari perencanaan, yaitu *business planning* dan *investment planning*. *Business planning* (perencanaan bisnis) adalah upaya menghasilkan pendapatan melalui usaha baik yang baru dimulai maupun yang sedang berjalan. Sedangkan *investment planning* (perencanaan investasi) adalah upaya menghasilkan pendapatan atau peningkatan kekayaan melalui penanaman modal baik langsung ke sektor riil seperti dalam bentuk kerjasama usaha maupun melalui lembaga keuangan syariah.

Kedua, *Risk management*, yaitu mengelola risiko (potensi kehilangan, kekurangan, kerugian) dari pengelolaan harta baik risiko pasar, risiko investasimaupun risiko alamiah. Pengelolaan risiko ini dalam rangka perlindungan terhadap harta (*wealth protection*). Oleh karena itu pengelolaan risiko dapat menggunakan secara tradisional tanpa asuransi atau dengan asuransi syariah. Ketiga, *personal financial planning*, yaitu upaya mengelola keuangan (harta) secara perorangan sebelum memiliki keluarga dari aspek pengeluaran. *Personal financial planning* ini merupakan derivasi dari aspek pengeluaran atau pemanfaatan harta (*wealth spending*). Pengelolaan pengeluaran keuangan dalam bagian ini terdiri dari pengeluaran untuk (i) kebutuhan sehari-hari; (ii) pembelian

rumah; (iii) pembelian kendaraan; (iv) persiapan menikah; (v) persiapan pensiun; dan (vi) liburan.

Ketiga, *family financial planning*, yaitu upaya mengelola keuangan (harta) secara kolektif dalam sebuah keluarga dari aspek pengeluaran. *Family financial planning* ini juga merupakan derivasi dari aspek pengeluaran atau pemanfaatan harta (*wealth spending*). Pengelolaan pengeluaran keuangan keluarga paling tidak terdiri dari pengeluaran untuk (i) nafkah keluarga; (ii) persiapan kelahiran anak; (iii) aqiqah anak; (iv) khitan anak; (v) pendidikan anak; (vi) nafkah orang tua; dan (vii) persiapan untuk warisan.

Keempat, *religiosity financial planning*, yaitu upaya mengelola keuangan (harta) untuk kebutuhan keberagamaan dan pengeluaran di jalan Allah. *Religiosity financial planning* merupakan derivasi dari aspek pengeluaran atau pemanfaatan harta (*wealth spending*) dan aspek pendistribusian harta (*wealth distribution*). pengelolaan pengeluaran relijiusitas paling tidak terdiri dari pengeluaran untuk (i) zakat; (ii) haji; (iii) umrah; (iv) qurban; (v) infaq; (vi) shadaqah; (vii) wakaf; (viii) hibah; dan (ix) wasiat. Uraian di atas dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: Sugianto, Epistemologi, *Disertasi* S3 Program Pascasarjana UIN SU Medan 2018, h. 174

Gambar 2.1. Aspek-aspek dan unsur-unsur *Islamic Wealth Management*

Kajian *wealth management* dalam perspektif Islam telah mulai banyak dilakukan oleh para ahli dan akademisi. Kajian-kajian ini dalam bentuk teoritis dilakukan untuk mengkritisi *wealth management* konvensional dan untuk memperoleh landasan filosofi dalam perspektif Islam. Kajian empiris juga sudah mulai dilakukan sebagai upaya untuk melihat praktik terutama yang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah. Di antara kajian-kajian tersebut adalah Ma'sum Billah (2012), Mohammad Omar Farooq (2014), Muhammad Syukri Salleh (2012), Fadzila Azni Ahmad (2011).

Beberapa penelitian terkait dengan *wealth management* dalam perspektif Islam, menunjukkan bahwa perilaku pengelolaan kekayaan tidak selalu didasarkan pada perilaku keberagamaan seseorang, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Tahir dan Brimble (2011) terkait dengan perilaku berinvestasi Muslim. Mereka menyimpulkan bahwa perilaku investasi Muslim yang religius memilih investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, sedangkan perilaku investasi Muslim yang tidak religius sama saja dengan perilaku investasi non-Muslim.

Hal ini juga ditemukan oleh Ibrahim dan Minai (2009) bahwa penciptaan kekayaan melalui obligasi syariah bukan karena preferensi investor terhadap aktivitas kepatuhan Islam namun disebabkan oleh beberapa faktor dari teori struktur modal yang ada. Hasil penelitian Purnomo dan Maulida (2017) tentang perencanaan keuangan pengusaha Muslim alumni Gontor menemukan bahwa informan yang diteliti telah menerapkan sebagian besar teori *Islamic financial planning*, namun kaitannya dengan lembaga keuangan masih rendah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Proses penelitian ini pada dasarnya berbentuk siklus, akan tetapi dapat dibedakan adanya tiga tahap utama (sesuai dengan sifat/karakteristik kegiatannya), seperti berikut. *Pertama*, tahap orientasi/eksplorasi yang bersifat menyeluruh, dengan melakukan apa yang oleh Spradley sebut sebagai *grand tour observation* dan/atau *grand tour questions*. *Kedua*, tahap melakukan eksplorasi secara terfokus, sesuai dengan domain yang dipilih sebagai fokus (dari analisis di

tahap I); pilihan domain dimaksud menggunakan tiga macam pertimbangan, yaitu *organizing domain*, *strategic ethnography*, dan *theoretical interest*. Ketiga, tahap mengecek hasil/temuan penelitian, terutama dengan melakukan apa yang oleh Lincoln dan Guba sebut sebagai prosedur *member check*.

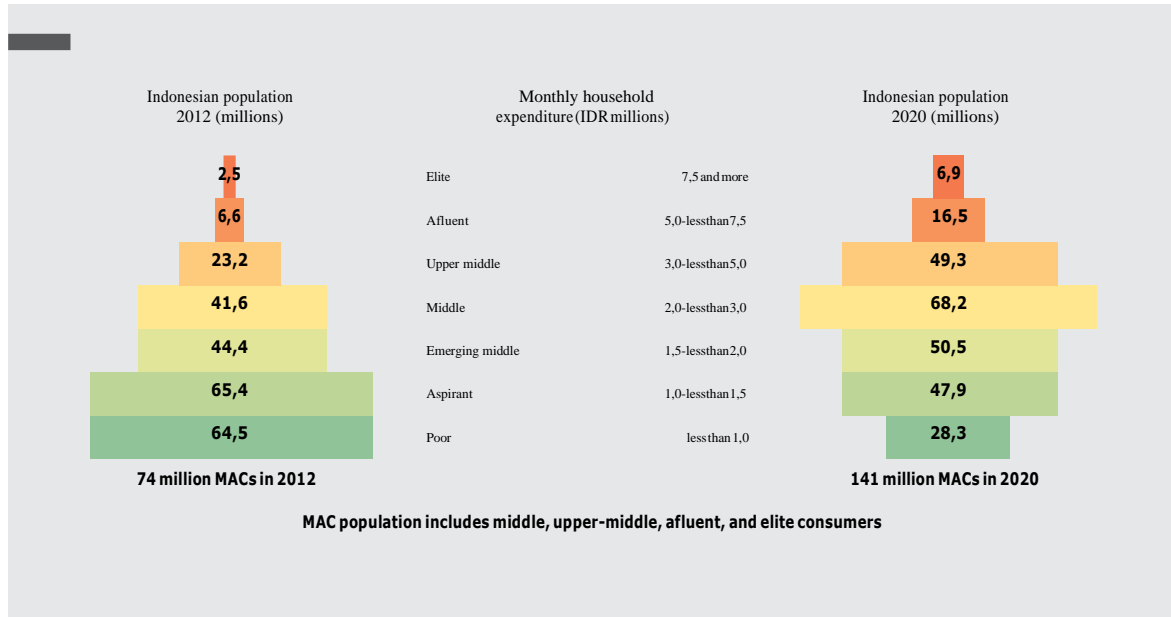
Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, teknik dokumenter Informan penelitian adalah masyarakat kelas menengah Muslim yang dipilih secara purposif, yaitu para profesional dan pengusaha yang berjumlah 30 orang. Data yang dihimpun kemudian dianalisis dengan (1) analisis domain, (2) analisis taksonomis, (3) analisis komponensial, dan (4) analisis tema.

## **Temuan Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Kelas Menengah Muslim Kota Medan**

Indonesia adalah salah satu negara terbesar di Asia Tenggara yang menikmati manfaat dari transformasi ekonomi yang diprakarsai oleh rezim Orde Baru (1967-1998). Transformasi ekonomi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan modernisasi ekonomi dan pembangunan. Selanjutnya memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan bahkan menciptakan kelas baru yang disebut kelas menengah tahun 1980-an. Ciri kelas menengah Indonesia ini adalah munculnya beberapa pekerjaan baru seperti eksekutif dan manajer bisnis, analis saham, insinyur, bankir, pengacara, akuntan, petugas kerah putih yang bekerja di pusat kota dan pekerjaan profesional lainnya yang sedang *booming* (McKinsey Global Institute, 2012).

Kelas menengah merupakan bagian dari lokomotif penggerak ekonomi di Indonesia, karena kemampuan daya belinya. Secara jumlah kelas menengah Indonesia memang fantastis, BCG (2012) dalam laporannya menyebutkan tahun 2012 jumlah MAC (Middle-Class and Affluent Consumers) di Indonesia berjumlah 74 juta jiwa, McKinsey yang lebih konservatif menyebutkan kelas menengah Indonesia tahun 2012 sebanyak 45 juta jiwa (McKinsey Global Institute, 2012). Beberapa lembaga domestik bahkan menyebutkan jumlah lebih fantastis, menurut mereka paling tidak 141 juta penduduk Indonesia adalah kelas menengah di tahun 2020 (Ali dan Lilik, 2016).



Sumber: BCG Analysis

Gambar 4.2. MAC (Middle-Class and Affluent Consumers) in Indonesia

Pada tahun 1999, hanya 25% dari populasi dapat diklasifikasikan sebagai kelas menengah, tetapi satu dekade setelahnya, pada tahun 2010, ada sekitar 146 juta atau 57% populasi termasuk kelas menengah. Jumlah ini bahkan diperkirakan akan tumbuh lebih cepat karena dalam beberapa dekade mendatang, Indonesia diharapkan mendapat manfaat dari demografinya (Yuswohady dan Gani, 2015).

Sumatera Utara adalah Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 1990 penduduk Sumatera Utara keadaan tanggal 31 Oktober 1990 berjumlah 10,26 juta jiwa, kemudian berdasarkan hasil SP 2000, jumlah penduduk Sumatera Utara sebesar 11,51 juta jiwa. Sedangkan dari hasil Sensus Penduduk pada bulan Mei 2010 (SP 2010) jumlah penduduk Sumatera Utara 12.982.204. kabupaten/Kota yang 3 terbesar penduduknya adalah berturut-turut Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan kabupaten Langkat (BPS Sumatera Utara, 2018; BPS, 2013).

Kota Medan adalah termasuk daerah perkotaan 100 persen sehingga BPS menetapkan bahwa jumlah penduduk daerah pedesaan adalah 0 (nol), sedangkan penduduk daerah perkotaannya sebesar 2.247.425 jiwa pada tahun 2017 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.9. Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan. Dari ke 21 kecamatan tersebut terdapat 11 kecamatan yang tingkat kepadatannya cukup besar, yaitu Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Marelan,

Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Selayang, dan Kecamatan Medan Timur. Sedangkan dari sisi laju pertumbuhan penduduk juga mengalami penurunan (BPS Kota Medan, 2016).

Jika jumlah penduduk dilihat berdasarkan agama, menurut hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa persentase penduduk muslim di Indonesia sebesar 87,13 % atau 207,176 juta jiwa (BPS, 2013). Persebaran penduduk muslim Indonesia mengikuti persebaran jumlah penduduk menurut daerah di Indonesia. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, diikuti pulau Sumatra, pulau Kalimantan, pulau Sulawesi kemudian pulau Bali, Nusa Tenggara dan Maluku Papua. Jika dilihat per pulau, proporsi muslim di Pulau Jawa paling besar dibanding pulau lain, yakni mencapai 95.64%. Pulau dengan penduduk muslim terbesar berikutnya adalah Pulau Sumatra dengan proporsi penduduk muslim mencapai 87.12%, kemudian Pulau Sulawesi (80.89%), Pulau Kalimantan (78.23%), Bali-Nusa Tenggara (40.42%), kemudian Maluku-Papua (37.13%).

Proporsi penduduk muslim terbesar berada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra karena memang konsentrasi penyebaran agama Islam berada di kedua wilayah tersebut. Islam datang ke Indonesia berawal dari proses perdagangan, dimana Selat Malaka sebagai jalur utama perdagangan. Oleh karena itu, sangat logis jika muslim terbesar tidak jauh dari Selat Malaka dan jalur perdagangan lain yang dilewati oleh pedagang Arab dan Gujarat. Simbol penyebaran Islam di Indonesia (dulunya Nusantara) adalah Wali Songo yang semua bukti sejarahnya ada di Pulau Jawa. Dengan demikian, wajar di Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk muslim terbesar. Jika dilihat dari geografis provinsi, Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi di Pulau Jawa dan bahkan di Indonesia dengan jumlah muslim terbesar. Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah muslim terbesar di Pulau Sumatera, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di Sulawesi. Di Pulau Jawa dan Sumatera persebaran muslim hampir sama banyaknya di setiap provinsi. Jumlah penduduk muslim di wilayah Indonesia Timur (Nusa Tenggara, Maluku, Papua) menjadi yang paling rendah jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia Barat.



Sedangkan jumlah penduduk Kota Medan berdasarkan agama berdasarkan data BPS tahun 2015, jumlah penduduk yang beragama Islam yang terbesar, yaitu 1.302.643 atau 58,43%, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Medan Berdasarkan Agama Tahun 2016**

No	Agama	Persentase	Jumlah
1	Islam	58,43%	1.302.643
2	Kristen	29,26%	652.325
3	Budha	9,95%	221.826
4	Hindu	2,15%	47.932
5	Konghuchu	0,21%	4.682
Jumlah			2.229.408

Sumber: BPS Kota Medan 2015

Jika diasumsikan kelas menengah Indonesia pada tahun 2010 adalah 57% yang umumnya terpusat di daerah perkotaan atau diperkirakan 42%, maka dapat diperkirakan penduduk kelas menengah Kota Medan sebesar 936.351 jiwa. Jika penduduk yang beragama Islam adalah 58,43%, maka jumlah kelas menengah Muslim Kota Medan diperkirakan sebesar 547.110 jiwa.

## 2. Pengelolaan Harta Kelas Menengah Muslim Kota Medan

Responden penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari kelompok profesional dan kelompok pengusaha. Jika dilihat dari jenis kelamin, maka responden laki-laki yang terbanyak yaitu 22 orang atau 73,33% sedangkan responden perempuan berjumlah 8 orang. Berdasarkan usia responden, maka usia terbanyak adalah usia 41-65 tahun, yaitu sebesar 18 orang atau 60% sedangkan sisanya, 12 orang usia lebih muda, yaitu 26-40 tahun. Sedangkan jika ditinjau dari latar belakang pendidikan, maka pendidikan responden yang terbanyak adalah S2, yaitu sebesar 15 orang atau 50%, disusul oleh S1 sebesar 10 orang atau 33,33%, tingkat SMA/MA sebanyak 4 orang atau 13,33% dan S3 hanya 1 orang. Apabila dilihat dari sisi pekerjaan responden, maka jumlah pengusaha lebih besar yaitu 16 orang atau 53,33% sedangkan profesional sebanyak 14 orang atau 46,67%.

Pandangan responden dalam kelompok pertama tentang penciptaan harta dalam kaitannya dengan karir responden adalah bahwa mereka berkarir memang untuk memperoleh harta dan kekayaan yang lebih cepat dan lebih besar. Hal ini

karena responden berpandangan bahwa ketika mengawali karirnya ia beranggapan akan memudahkannya untuk memperoleh penghasilan yang relatif besar. Kelompok kedua adalah responden yang mengawali karirnya tidak memikirkannya seberapa besar dan seberapa cepat memperoleh penghasilan atau kekayaan. Bagi kelompok ini adalah awal karir adalah memperoleh pengalaman. Sedangkan kelompok ketiga adalah responden yang menjadikan karir tersebut sebagai batu loncatan untuk mencapai kemampuan finansial yang lebih berkelanjutan untuk menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain.

Terdapat dua perencanaan penting dalam aspek penciptaan dan pengembangan harta, yaitu perencanaan bisnis (*business planning*) dan perencanaan investasi (*investment planning*). Perencanaan bisnis terkait dengan kemampuan untuk menciptakan dan menghasilkan kekayaan dan harta. Sedangkan perencanaan investasi terkait dengan pengembangan harta dan kekayaan yang dimiliki untuk lebih berkembang dan menghasilkan *benefit* secara finansial serta asset.

Terdapat dua kelompok responden dalam hubungannya dengan perencanaan bisnis. Kelompok responden pertama merupakan kelompok responden yang merencanakan bisnisnya. Umumnya kelompok ini adalah dari responden pengusaha, walaupun dari kelompok profesional juga ada yang memiliki perencanaan bisnis. Dari kalangan pengusaha perencanaan bisnis dikarenakan tuntutan bisnis yang dijalankan terutama karena memiliki partner yang mengharuskan perlunya perencanaan bisnis tersebut. Sementara responden dari kalangan profesional yang memiliki perencanaan karena persiapan untuk keluar dari profesinya selama ini. Hal ini terungkap dari profesi perbankan.

Kelompok responden kedua adalah kelompok responden yang tidak memiliki perencanaan bisnis. Umumnya kelompok kedua ini dari responden profesional walaupun terdapat juga dari responden pengusaha. Bagi responden profesional yang tidak memiliki perencanaan bisnis dikarenakan waktunya sudah terfokus pada dunia profesinya. Sedangkan bagi pengusaha yang tidak memiliki perencanaan bisnis berpendapat bahwa bisnis itu harus dijalani saja tidak mesti ada perencanaan.

Responden yang melakukan proteksi terhadap harta kekayaan sebanyak 17 orang sedangkan yang tidak sebanyak 13 orang. Beberapa alasan yang dikemukakan responden yang melakukan proteksi terhadap kekayaannya adalah

*pertama*, harta perlu dilindungi karena harta tersebut telah diusahakan sedemikian rupa dan akan dimanfaatkan oleh anak dan cucu, maka sudah seharusnya dilakukan perlindungan. *Kedua*, harta perlu dilindungi karena bagian dari upaya menjaga harta dari kepunahan dan secara psikologis tidak berdampak buruk. *Ketiga*, harta yang telah diperoleh itu adalah amanah dari Allah SWT dan sudah menjadi keharusan untuk menjaga amanah tersebut. Karena sebagai Pemilik Mutlak harta, Allah akan meminta pertanggungjawabannya kelak.

Bagi responden yang tidak melakukan proteksi beralasan yang hampir sama dengan alasan ketiga di atas bahwa harta tersebut adalah milik Allah dan amanah bagi responden. Hanya saja penjelasannya yang berbeda. Jika terjadi kehilangan atau kerusakan itu berarti Allah telah mengambil kembali harta tersebut.

Perencanaan kebutuhan sehari-hari adalah perencanaan terhadap pengeluaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makan, minum, transportasi, pulsa dan lain-lain. Terdapat 24 responden atau 80% yang menjawab bahwa mereka melakukan perencanaan keuangan untuk memenuhi pengeluaran kebutuhan sehari-hari tersebut. Menurut mereka pengeluaran kebutuhan sehari-hari ini perlu dilakukan perencanaan agar dapat dikontrol dengan baik dan tidak terjadi pemborosan.

Responden yang menggunakan lembaga keuangan untuk *personal financial planning* mereka hanya 7 orang atau 23,33%. Pemanfaatan lembaga keuangan terutama untuk perencanaan pembelian rumah dan pembelian kendaraan. Dari ke tujuh responden yang menggunakan lembaga keuangan untuk perencanaan keuangan personal mereka yang memanfaatkan lembaga keuangan syariah hanya 3 (tiga) orang saja.

Perencanaan kebutuhan keluarga adalah perencanaan terhadap pengeluaran untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, seperti kebutuhan dapur, transportasi anak, uang saku anak-anak, rekening listrik, air, telepon dan lain-lain. Terdapat 27 responden atau 90% yang menjawab bahwa mereka melakukan perencanaan keuangan untuk memenuhi pengeluaran kebutuhan keluarga tersebut. Menurut mereka pengeluaran kebutuhan keluarga ini perlu dilakukan perencanaan agar dapat dikontrol dengan baik dan tidak terjadi pemborosan sekaligus mendidik anggota keluarga terutama anak-anak dalam merencanakan pengeluaran mereka. Alasan responden yang tidak melakukan perencanaan dalam pengeluaran untuk

kebutuhan keluarga adalah dikarenakan bahwa pengeluaran ini merupakan pengeluaran rutin yang sebagiannya dilakukan secara bulanan. Jadi tidak akan menjadi masalah.

Responden yang melakukan perencanaan keuangan untuk warisan sebanyak 27 orang atau 90% dari seluruh responden. Alasan bagi responden yang menjawab melakukan perencanaan karena bagi mereka warisan penting bagi keberlangsungan keluarga ketika responden telah wafat. Terdapat tiga cara utama yang dilakukan responden untuk mempersiapkan perencanaan keuangan untuk warisan. *Pertama*, dengan membeli property, *kedua*, dengan memperkuat perusahaan (kepemilikan saham perusahaan), dan *ketiga*, melalui lembaga keuangan.

Responden yang menggunakan lembaga keuangan untuk *family financial planning* mereka sebanyak 17 orang atau 56,67%. Pemanfaatan lembaga keuangan terutama untuk perencanaan keuangan untuk pendidikan anak, sebagian untuk warisan melalui asuransi. Dari ke 17 responden yang menggunakan lembaga keuangan untuk perencanaan keuangan personal mereka yang memanfaatkan lembaga keuangan syariah sebanyak 12 orang atau 40%.

Terdapat 27 responden atau 90% yang menjawab bahwa mereka melakukan perencanaan keuangan untuk pengeluaran zakat. Menurut mereka pengeluaran keuangan untuk zakat ini perlu dilakukan perencanaan agar pelaksanaan zakat sebagai bagian dari kewajiban seorang muslim dapat dilaksanakan dengan benar. Alasan responden yang tidak melakukan perencanaan dalam pengeluaran untuk zakat adalah dikarenakan bahwa pengeluaran ini bergantung pada kondisi dan jumlah harta setiap tahunnya.

Perencanaan keuangan untuk haji adalah perencanaan terhadap pengeluaran keuangan dalam rangka melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Makkah. Terkait dengan perencanaan ibadah haji ini, sebagian besar responden, yaitu 27 orang atau 90% menjawab melakukan perencanaan dalam persiapan ibadah haji tersebut. Terdapat satu alasan responden yang penting dalam menjawab hal ini. Bahwa ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang mempersyaratkan memiliki kemampuan bagi orang Islam. Di antara kemampuan tersebut adalah kemampuan secara finansial, baik biaya dalam keberangkatan maupun biaya untuk keluarga yang ditinggalkan karena cukup lama yaitu 40 hari, sehingga perlu direncanakan agar ibadah haji tersebut dapat dilaksanakan sebaik-

baiknya tanpa ada gangguan, terutama masalah keuangannya. Bagi responden yang tidak melakukan perencanaan persiapan ibadah haji bahwa jika sudah mendapat panggilan dari Allah juga akan berangkat.

Responden yang melakukan perencanaan keuangan untuk umrah berjumlah 23 orang responden atau 76,67%, sedangkan yang tidak melakukan perencanaan pembelian kendaraan hanya 7 orang atau 23,33%. Alasan responden yang melakukan perencanaan terutama disebabkan bahwa umrah itu adalah sunnah dan sebagai pelengkap ibadah haji yang patut dilakukan, apalagi untuk dapat giliran beribadah haji juga cukup lama jarak waktunya, sehingga perlu direncanakan.

Perencanaan keuangan untuk qurban maksudnya adalah perencanaan keuangan yang dipersiapkan untuk berqurban setiap tahunnya. Hal ini menjadi penting apabila dimaksudkan untuk seluruh anggota keluarga. Pada bagian pertanyaan ini responden yang menjawab melakukan perencanaan sebanyak 13 orang atau 43,33% sedangkan yang menjawab tidak melakukan perencanaan sebanyak 17 orang atau 56,67%.

Responden yang menggunakan lembaga keuangan untuk *religiosity financial planning* mereka terbanyak untuk persiapan ibadah haji dan umrah. Di samping itu sebagai untuk kepentingan wakaf. Sedangkan penggunaan lembaga keuangan untuk penyaluran zakat karena untuk kemudahan. Namun demikian secara umum masih kecil dalam penggunaan lembaga keuangan syariah untuk perencanaan keuangan keagamaan.

## **Kesimpulan**

Secara umum responden telah melakukan pengelolaan harta. Perencanaan bisnis dan perencanaan investasi sebagian besar telah dilakukan oleh kelas menengah muslim Kota Medan. Hanya saja pemanfaatan LKS masih rendah. Perencanaan untuk perlindungan harta melalui lembaga keuangan syariah masih rendah, tetapi menariknya melalui zakat dan sedekah.

Perencanaan keuangan personal cukup baik namun penggunaan lembaga keuangan syariah masih rendah. Perencanaan keuangan keluarga juga cukup baik namun penggunaan lembaga keuangan syariah masih rendah. Sedangkan perencanaan keuangan keagamaan belum menjadi upaya demikian pula dalam penggunaan lembaga keuangan syariah yang masih rendah.

**Daftar Pustaka**

- Adam Ng, Mansor Ibrahim dan Abbas Mirakhor. 2015. On building social capital for Islamic finance, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 8 No. 1.
- Agus Purnomo dan Atika Zahra Maulida. 2017. Implementasi Islamic Financial Planning dalam Perencanaan Keuangan Pengusaha Muslim Alumni Gontor Yogyakarta. *Nuansa*, Vol. 14 No. 1 (Januari – Juni 2017): 104-122.
- BPS Sumatera Utara. 2018. *Provinsi Sumatera Utara dalam Angka*.
- BPS. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPPN-BPS-UNPF.
- Detik Finance. 2016 Kelas Menengah 129 Juta, yang Bayar Pajak Cuma 27 Juta Orang. Senin 11 Januari 2016, 19:49 WIB, <https://finance.detik.com>.
- Fadzila Azni Ahmad. 2011. *Kaedah Pengurusan Institusi-institusi Pembangunan Berteraskan Islam di Malaysia*. Shah Alam, Selangor: Penerbit Universiti Teknologi MARA (UPENA).
- Hasanuddin Ali dan Lilik Purwandi. 2016. *Indonesia 2020: The Urban Middle Class Millennials*. Jakarta: Alvira Research Center.
- [https://www.bcgperspectives.com/content/articles/center\\_consumer\\_customer\\_insight\\_consumer\\_products\\_indonesias\\_rising\\_middle\\_class\\_affluent\\_consumers/?chapter=3](https://www.bcgperspectives.com/content/articles/center_consumer_customer_insight_consumer_products_indonesias_rising_middle_class_affluent_consumers/?chapter=3).
- Imran Tahir dan Mark Brimble. 2011. Islamic Investment Behaviour. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 4 No. 2 (2011): 116-130.
- McKinsey Global Institute. 2012. Perekonomian Nusantara: Menggali Potensi Terpendam Indonesia. September 2012, <http://mckinsey.com>
- Mohammad Omar Farooq. 2014. Islamic Wealth Management and the Pursuit of Positive-Sum Solutions. *Islamic Economics Studies*. Vol. 22. November 2014: 2.
- Mohd. Ma'sum Billah. 2012. *Islamic Wealth Management & World View*. artikel dari [www.Slideshare.com](http://www.Slideshare.com) (diakses 15 Oktober 2012).
- Muhammad Syukri Salleh. 2012. "Rethinking Wealth Management: An Islamic Preliminary View," *International Journal of Business and Social Science*, vol.3, 13 (July 2012).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*. Jakarta: OJK.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat.

Sugianto. 2018. Epistemologi *Islamic Wealth Management* dan Model Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, *Disertasi S3 Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN SU Medan*.

Ubaidillah Nugraha. 2007. *Wealth Management*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Yusnidah Ibrahim and Mohd Sobri Minai. 2009. Islamic Bonds and The Wealth Effects: Evidence from Malaysia, *Investment Management and Financial Innovations*, Volume 6, No 1.

Yuswohady dan Kemal E. Gani. 2015. *8 Wajah Kelas Menengah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.